

**PEMODELAN
UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
PROFESI GURU PENDIDIKAN
TEKNOLOGI DAN KEJURUAN**

**Oleh :
Drs. Dadang Hidayat M., M.Pd. dkk**

LATAR BELAKANG

- 1. REORIENTASI DALAM MENYIKAPI KEBUTUHAN LULUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN**
 - Pertumbuhan industri berada pada fase "*knowledge-based economy*"
 - Dunia usaha dan dunia industri "*do different things differently*"
 - Dunia usaha dan dunia industri berevolusi ke arah "*knowledge-based organization*"
 - Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, akibat pergeseran nilai-nilai
 - Perlu mempersiapkan dan meningkatkan kualitas guru
- 2. TANTANGAN BAGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN SEBAGAI BASIS PENYEDIA SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**
 - Tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan belum terstandar secara baku, ditinjau dari latar belakang keahlian, kualifikasi dan relevansi kompetensinya
- 3. PERAN APTEKINDO DALAM SISTEM PELAYANAN PENDIDIKAN**
 - Mempertinggi profesionalisme tenaga kependidikan kejuruan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat
- 4. KONDISI PENDIDIK PADA LINGKUNGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEJURUAN**
 - Variabilitas yang besar tentang latar belakang pendidikan dalam arti relevansi umum dan khusus pada LPTK Teknologi dan Kejuruan di Indonesia dalam menghasilkan lulusan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Data dan spesifikasi bidang keahlian, kelompok & prasyarat kompetensi serta prosedur apa yang diperlukan untuk tujuan pemodelan uji sertifikasi profesi?
2. Bagaimana model yang dikembangkan dalam pelaksanaan penyusunan instrumen uji sertifikasi profesi?
3. Bagaimana model yang dikembangkan dalam sistem dan mekanisme uji sertifikasi profesi?
4. Bagaimana pelibatan partisipan (APTEKINDO, DUDI) dalam pemodelan sistem dan mekanisme uji sertifikasi profesi?
5. Bagaimana efektivitas proses dan hasil pemodelan instrument, sistem dan mekanisme uji sertifikasi profesi?

BATASAN MASALAH

- Menetapkan berbagai rujukan konseptual pemodelan uji kompetensi dan sertifikasi yang berlaku umum,
- Merujuk landasan legalisasi (perundang-undangan, peraturan pemerintah, standar guru/dosen/ instruktur pada berbagai departemen/BUMN, dan dunia industri/Usaha, baik di dalam maupun luar negeri),
- Menetapkan prosedur pemetaan jumlah bidang keahlian dan program keahlian diturunkan pada kompetensi guru di lingkungan penyelenggara di Indonesia,
- Melakukan pemodelan penyusunan instrumen uji kompetensi dan sertifikasi,
- Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemodelan instrument instrumen uji kompetensi dan sertifikasi.

TUJUAN

UMUM

- Terciptanya suatu pemodelan uji dan sertifikasi kompetensi bagi guru pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia yang terstandar, dengan bentuk pemodelan teoretik dan praktik melalui penelitian dan pengembangan (*R and D*).

KHUSUS

- Tersedianya rujukan konseptual pemodelan uji kompetensi dan sertifikasi yang berlaku umum
- Tersedianya landasan legalisasi (perundang-undangan, peraturan pemerintah, standar guru/dosen/ instruktur pada berbagai departemen/ BUMN, dan dunia industri/Usaha, baik di dalam maupun luar negeri),
- Tersedianya prosedur pemetaan jumlah bidang keahlian dan program keahlian diturunkan pada kompetensi guru di lingkungan penyelenggara di Indonesia,
- Terlaksananya pemodelan penyusunan instrument uji kompetensi dan sertifikasi,
- Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemodelan instrumen uji kompetensi dan sertifikasi.

MANFAAT

- Adanya instrumen terstandar yang dapat digunakan dalam uji dan sertifikasi guru pendidikan teknologi dan kejuruan sesuai dengan bidang keahliannya,
- Adanya suatu model yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak berwenang, dalam rangka uji dan sertifikasi guru pendidikan teknologi dan kejuruan sesuai dengan bidang keahliannya,
- Adanya kepercayaan kepada institusi penyelenggara pendidikan teknologi dan kejuruan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

SASARAN

- Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan teknologi dan kejuruan, yang termasuk pada lingkungan Aptekindo,
- Guru-guru/dosen/instruktur yang telah dan akan menjadi pendidikan di lingkungan Aptekindo,

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

1. Perencanaan pengembangan model, mencakup:

- Tujuan pengembangan :
- Partisipan :
- Prosedur :
- Rancangan uji kelayakan

2. Pemodelan, merupakan aktivitas yang dilakukan melalui:

- pengkajian konsep pada tim inti;
- penyiapan perangkat modul konsep;
- Seminar dan lokakarya pada tim dan partisipan lainnya;
- kaji Lapangan;
- pemetaan institusi, penyebaran instrument uji coba;
- penetapan instrument terstandar;
- pelaksanaan validasi melalui eksperimen, dan
- perbaikan model, serta rekomendasi.

TINJAUAN ASPEK LEGAL

1. Aspek Legal Formal Tenaga Pendidik di Indonesia Perspektif Sebelum UU No 23 Tahun 2003:

- UU No.8 Tahun 1974 (Berkenaan dengan kepegawaian /PNS)
- UU No.2 Tahun 1989 (Pasal 27;28;30;31;32 masalah tenaga kependidikan)
- PP.No.29 tahun 1990 (Persekolahan /SLTA)
- PP.No.38 tahun 1992 (Persekolahan kejuruan)
- PP.No.39 Tahun 1992 (Peran serta masyarakat)
- PP. No.30 tahun 1992 (Perti)
- PP.No 60-61 Tahun 1990 (Perti)
- PP.No.14 Tahun 1994 (Diklat Jabatan PNS)
- PP.No.15 Tahun 1994 (Diklat Struktural PNS)
- PP.No.16 tahun 1994 (Diklat Fungsional PNS)

TINJAUAN ASPEK LEGAL

Perspektif Pasca UU No 23 Tahun 2003 :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Profesi
2. Hakekat pekerjaan profesional:
 - Tugas personal
 - Tugas sosial
 - Tugas profesional
3. Kriteria minimum tugas profesional:
 - Kompetensi konseptual
 - Kompetensi teknis
 - Kompetensi kontekstual
 - Kompetensi adaptif
 - Kompetensi interpersonal

SERTIFIKASI SBG KOMPONEN STRATEGIS DLM PERFORMANSI LPTK

Konsep dan nilai-nilai kriteria performansi pendidikan:

- Kepemimpinan yang mempunyai visi
- Pendidikan sebagai Pusat Pembelajaran
- Organisasi Pembelajaran Personal
- Kecerdasan
- Fokus ke Masa Depan
- Inovasi Manajemen
- Manajemen Berbasis Fakta
- Responsif terhadap Kewarganegaraan
- Fokus terhadap Hasil
- Perspektif terhadap sistem

KETERKAITAN KRITERIA DENGAN PENCAPAIAN PERFORMANSI

Dalam upaya peningkatan performansi pendidikan, maka kriteria sebagai patok duga (benchmarking), sangat erat kaitannya dengan seperangkat organisasi yang inovatif, meliputi:

- leadership;
- strategic planning;
- student, stakeholders, and market focus;
- information and analysis;
- faculty and staff focus;
- process management; dan
- organizational performance result.

SERTIFIKASI DALAM KONTEKS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

- Program sertifikasi profesi bagi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang berdampak pada kualitas lulusan baik lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maupun Sekolah Menengah Kejuruan.
- Tujuan diselenggarakannya program sertifikasi ini adalah guna mempertahankan kemampuan profesional dan akademik yang dimiliki oleh tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan.
- Dalam penjelasan UUSPN NO 20 Tahun 2003 Pasal 43 ayat 2 bahwa program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari pengembangan program pengembangan karier oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

MODEL SERTIFIKASI

Sejak 1940-an Amerika Serikat mengembangkan program sertifikasi guru yang dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- Bentuk Tes yang disebut *National Teacher Examination* (NTE),
- Tes Guru buatan negara bagian, dan
- Tes Guru yang mencakup kedua model tersebut.

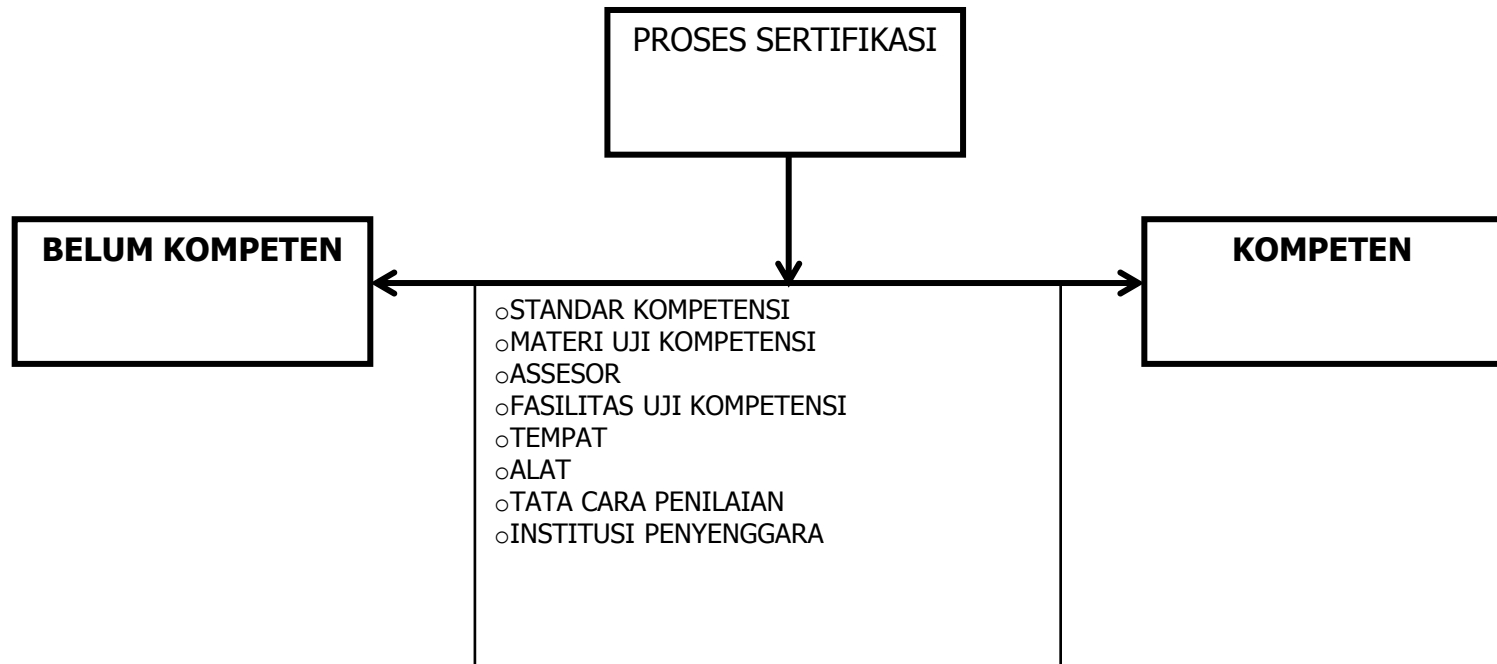
Kelemahan model tes tertulis ini dapat menjatuhkan moral guru

- Australia mengembangkan model portfolio untuk sertifikasi profesi guru dengan sistem desentralisasi, dengan istilah *Professional Recognition Program* (PRP).
- Model ini juga sudah dikembangkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat
- Indonesia dengan kebijakan otonomi daerah nampaknya cocok menggunakan model portfolio, yakni dilakukan bersama antara dinas pendidikan, LPTK, dan asosiasi profesi.

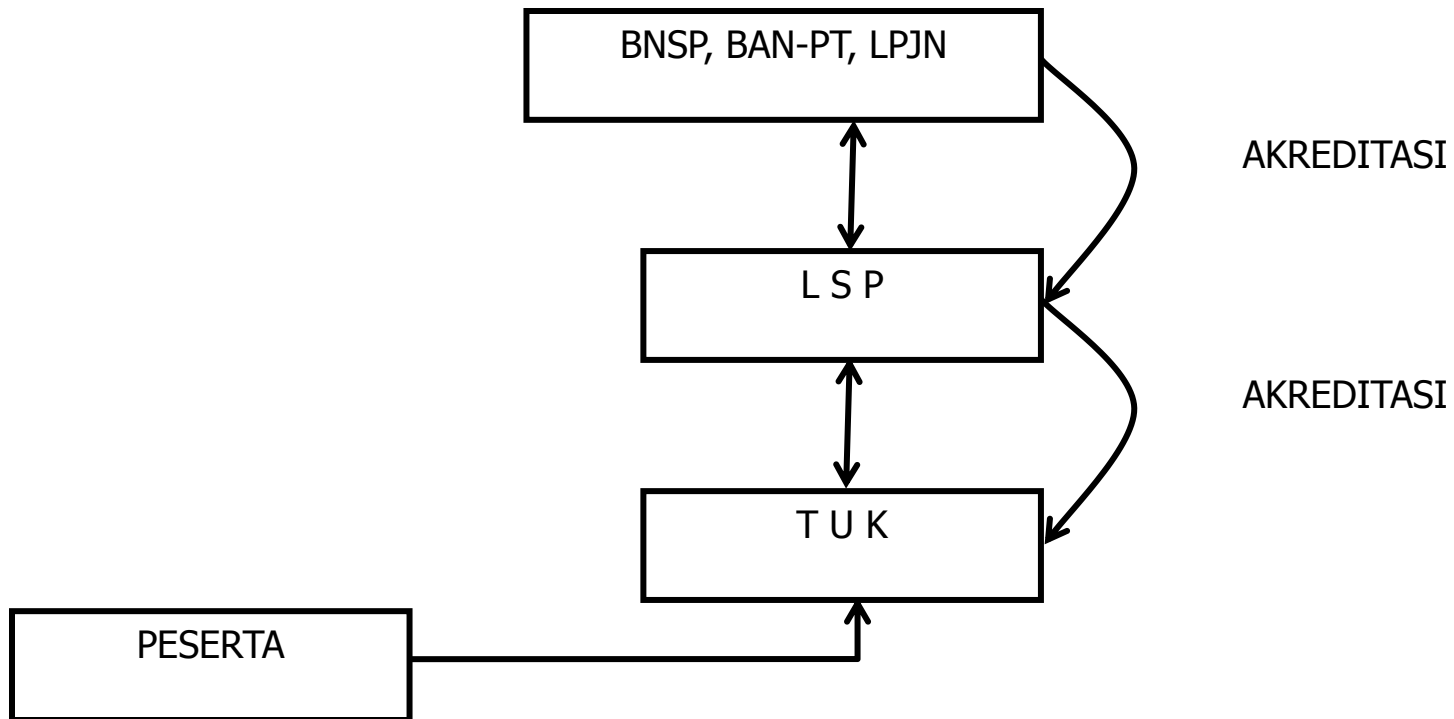
REKOMENDASI TEORETIS

- Berdasarkan program sertifikasi yang dilakukan di negara-negara maju maka program sertifikasi profesi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia memerlukan pendalaman pemikiran secara filosofi, substansi maupun format.
- Sertifikasi profesi pada pendidikan teknologi dan kejuruan setidaknya harus dipertimbangkan pada dua profesi yaitu sebagai guru dan sebagai orang yang ahli dalam program keahliannya.
- Sertifikasi profesi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan memiliki karakteristik yang khusus.

BAGAN MODEL SERTIFIKASI

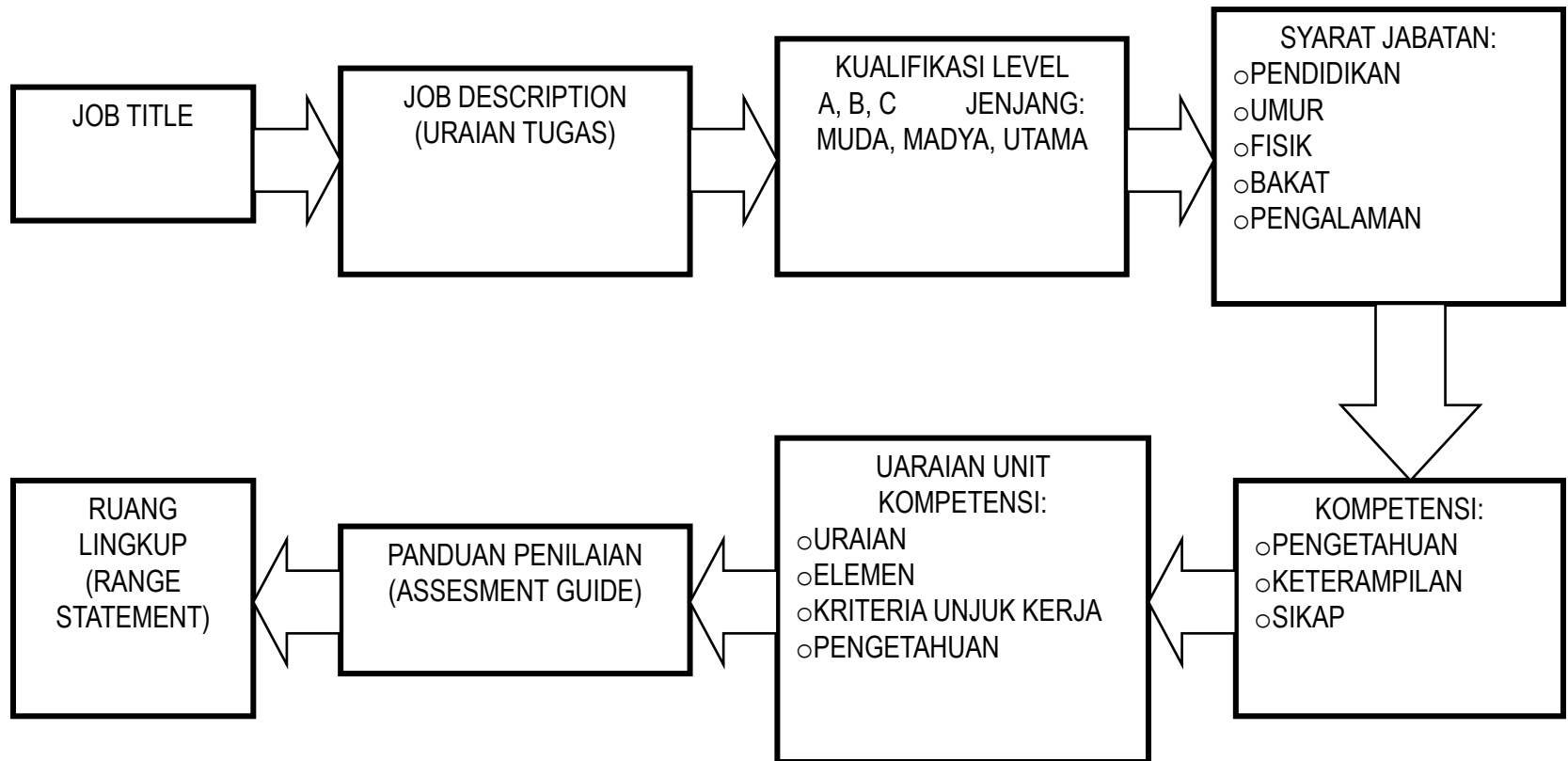


STRUKTUR KELEMBAGAAN SERTIFIKASI

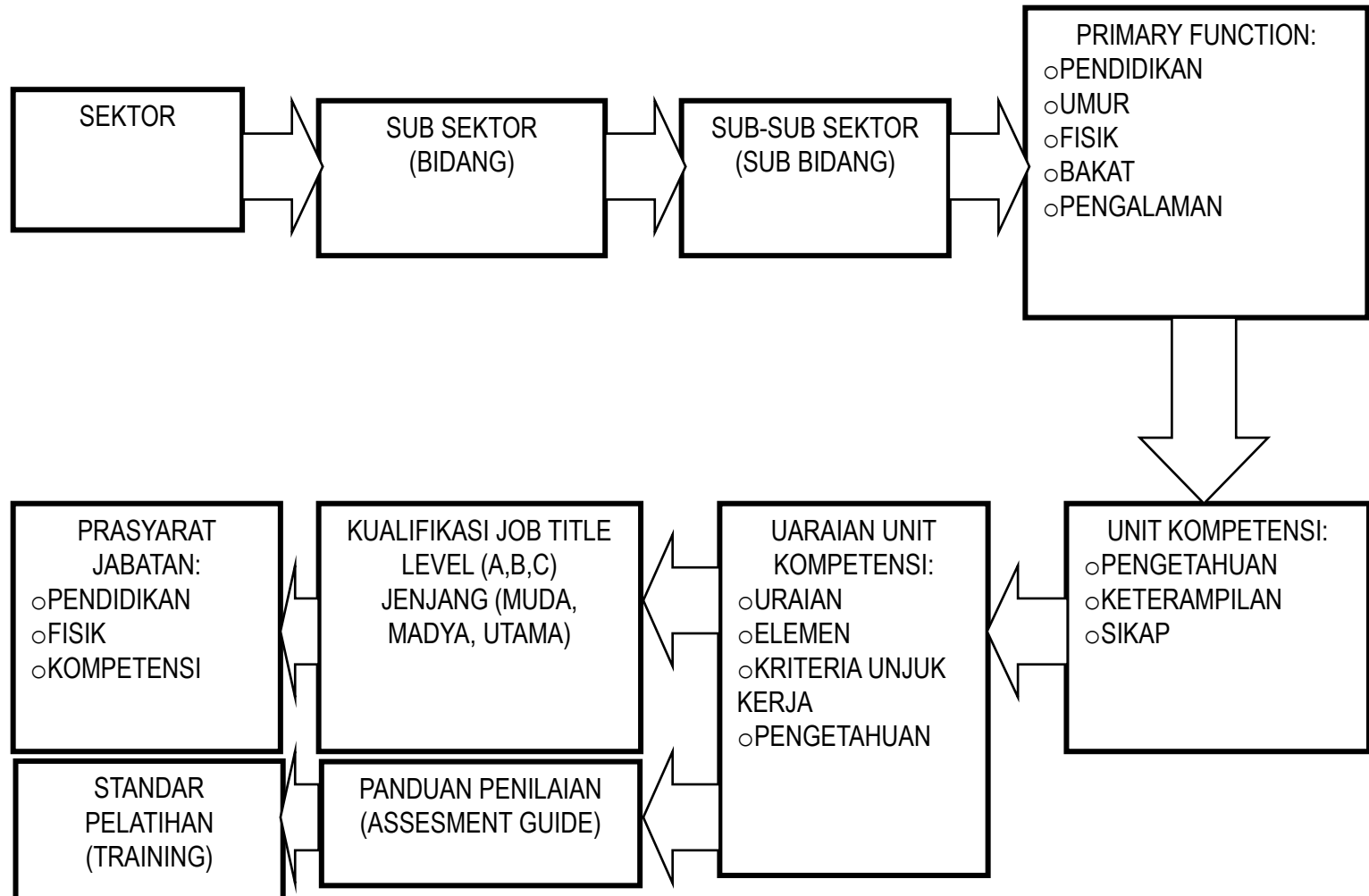


ACUAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI

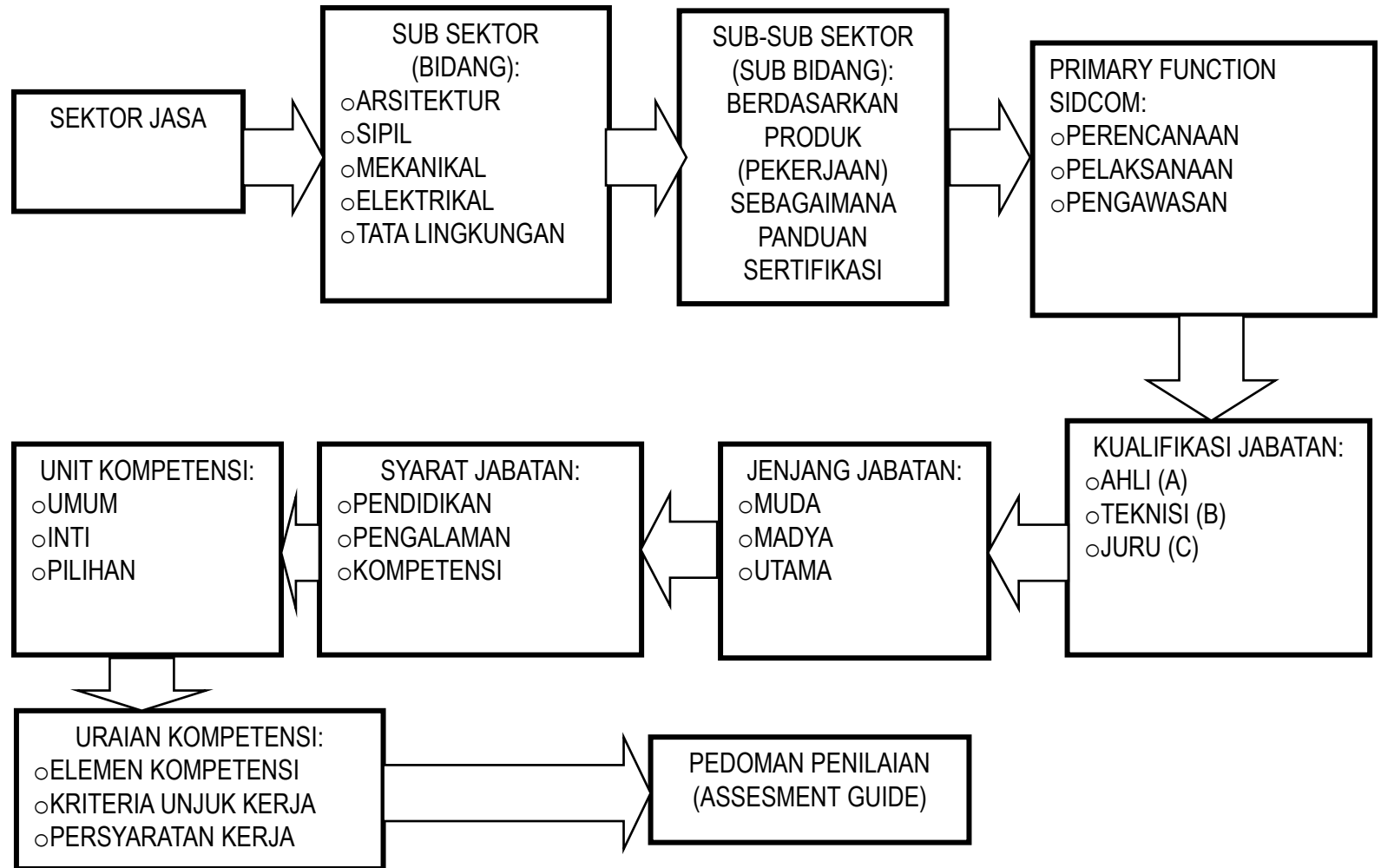
- Model Standar MOSS (Pendekatan Job Title)



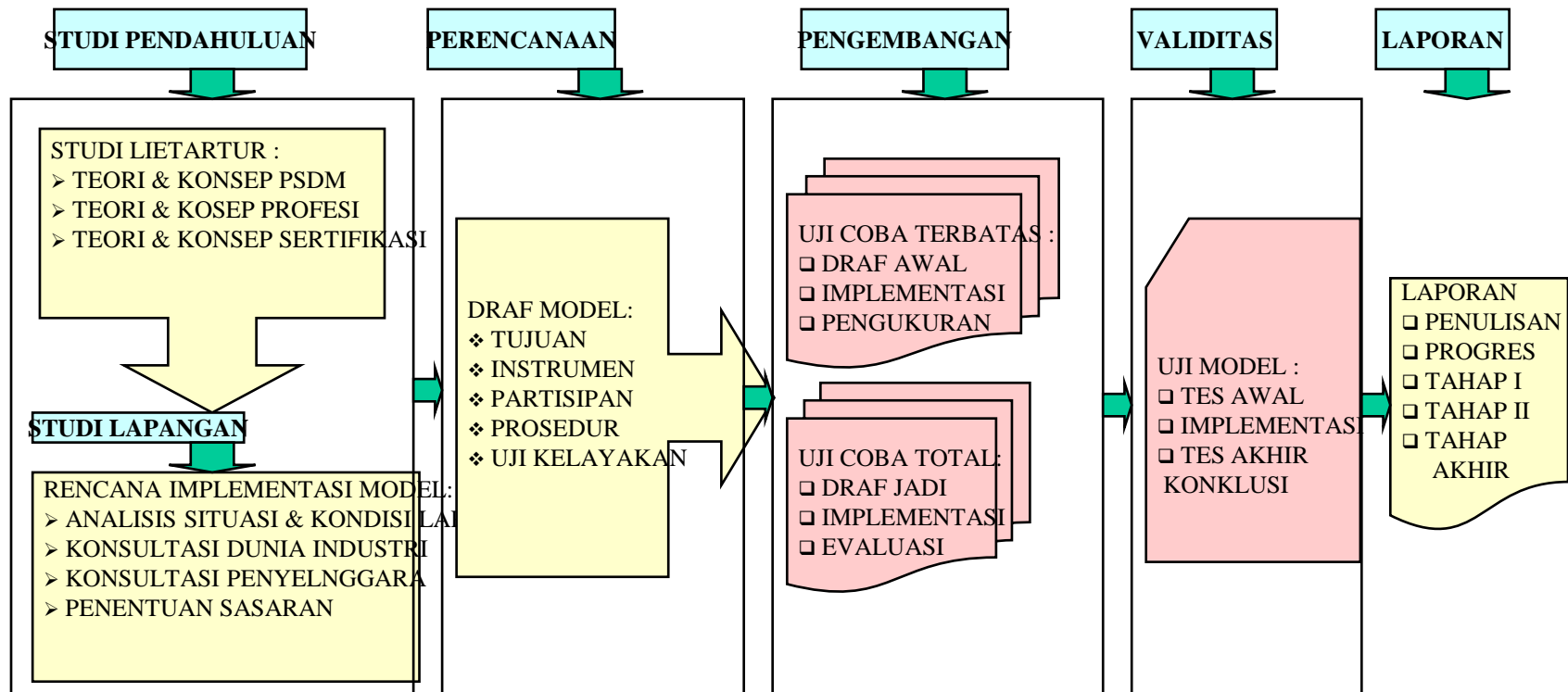
- Model Standar RMCS (Pendekatan Industri)



- Model Standar Kompetensi LPJK (Pendekatan Hibrid)



SISTEM PEMODELAN



Gambar 1.3 Proses Penelitian dan Pengembangan
Diadaptasi dari model : Borg & Gall